

LAPORAN KINERJA INDIVIDU (L K J)

2024



TRIWULAN II



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- b. Menghimpun rencana kegiatan seksi - seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan,tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
2.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3.	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
4.	Terpenuhinya Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
5.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Sekretaris Kecamatan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	54,68%	54,68%

Tabel 2.3
Cost per Outcome Sekretaris Kecamatan Tahun 2024 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1,873,153,552	991,726,439	52.94%	

● PENYAJIAN DATA KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	54,68%	54,68%	

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	54,68%	52,94%	1,74%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.
- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
 2. Kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang
- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**
 1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada
 2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
 3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag
 4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

- 1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
- 2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
- 3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- 4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain
.....

BAB III

PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 54,68% dan Capaian Anggaran sebesar 52,94%.
- b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.


CAMAT
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

Kedungjajang 01 Juli 2024
SEKRETARIS KECAMATAN

BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa bahwa Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan , idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang - undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- s. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengkoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan,tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
3.	Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes,APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

• **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kasi Pemerintahan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	50%	50%
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50%	50%
Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes,APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	50%	50%

Tabel 2.3
Cost per outcome Kasi Pemerintahan Tahun 2024 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	50%	50%				
2.	Terlaksananya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50%	50%				
3.	Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes,APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	50%	50%				
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					14.910.000	10.800.000	72,43%	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					7.200.000	3.600.000	50%	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					31.485.000	7.125.000	23%	

● PENYAJIAN DATA KINERJA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	0	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	6 dok	50%	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	0 dok	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 dokumen	3 dok	100%	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	0 dok	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	0 dok	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	0 dok	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING
Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	0 dok	0%	SUB KEGIATAN DI SELF BLOCKING

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50%	72,43%	-22,43%
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50%	50%	0%
3	Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	50%	23%	27%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

● **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Adanya komitmen dari tim binwas kecamatan dalam pendampingan perangkat desa secara optimal
2. Adanya kerjasama yang baik antara tim Binwas dengan tim Penyusun RKPDes, LPPDes, dan APBDes.

● **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

1. Belum sepenuhnya aparaturnya desa memahami tugas masing-masing
2. Keterbatasan SDM di seksi pemerintahan

- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**
 1. Pembinaan aparatur desa
 2. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain :

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain
.....

BAB III

PENUTUP

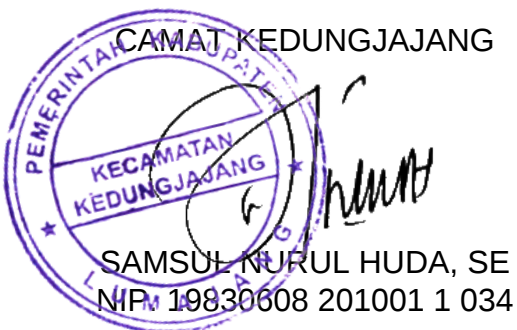
Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 50% dan Capaian Anggaran sebesar 72.43%, capaian kinerja sasaran Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 50% dan Capaian Anggaran sebesar 50%, sedangkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu sebesar 50% dan Capaian Anggaran sebesar 23%

b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu adanya komitmen dari tim binwas kecamatan dalam pendampingan perangkat desa secara optimal, dan adanya kerjasama yang baik antara tim Binwas dengan tim Penyusun RKPDes, LPPDes, dan APBDes

Kedungjajang, 01 Juli 2024

CAMAT KEDUNGJAJANG

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

KASI PEMERINTAHAN

SAHRIADI
NIP. 19670813 198703 1 008

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa /kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- p. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan,tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan desa	94%
2.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan desa	94%	62%	32%
Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	17%	83%

Tabel 2.3
Cost per Outcome Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan desa	94%	62%	66%				
2.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	17%	17%				
1	Meningkatnya presentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat					142,228,000	6,120,000	4,31%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga masyarakat	6 lembaga masyarakat	100%	
Terlaksananya Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	- Laporan	0%	
Meningkatnya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	60 Keluarga	20 Keluarga	33,3%	

Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	- Keluarga	0%	
Meningkatnya Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	24 Keluarga	- Keluarga	0%	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Berencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Berencana Rumah Tangga	24 Keluarga	- Keluarga	0%	

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Presentase Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Desa	62%	4.60%	57,4%
2.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	17%	3%	14%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.
- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang;
 2. Kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang.
- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**
 1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada;
 2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas;
 3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag;
 4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

- 1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
- 2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
- 3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain

.....

BAB III

PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 62% dan Capaian Anggaran sebesar 4,60%, Capaian Kinerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan sebesar 17% dan Capaian Anggaran sebesar 3%;
- b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.


CAMAT KEDUNGJAJANG,
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

Kedungjajang 01 Juli 2024
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

HOLAP, S.Sos
NIP. 19670101 199202 1 005

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan umum yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum; Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dan;
- i. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan,tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kasi Pelayanan Umum Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	100%	43%	43%

Tabel 2.3
Cost per Outcome Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Presentase Fasilitas Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	Presentase Fasilitas Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	100%	43%	43%				
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					9.504.800	3.600.000	37.9%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang limpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang limpahkan	3 Laporan	3 Laporan	100%	

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpakan Kepada Camat	43%	37.88%	5.12%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.
- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
 2. Kuantitas dan kwalitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang
- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**
 1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada
 2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
 3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag
 4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

- 1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
- 2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
- 3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- 4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain
.....

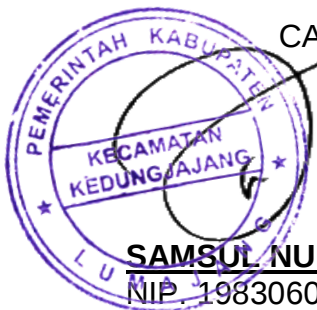
BAB III

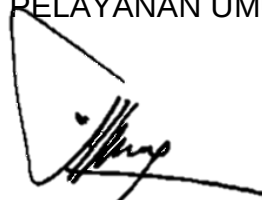
PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Presentase Fasilitasi Pelaksanaan Urausan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat sebesar 43% dan Capaian Anggaran sebesar 37.88%.
- b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

 CAMAT
SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

Kedungjajang 01 Juli 2024
KASI RELAYANAN UMUM

TOSIN SUSWIYANTO
NIP. 19670704 199403 1 015

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan,tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
2.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3.	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
4.	Terpenuhinya Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
5.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	50%	50%
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	60%	60%
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	0%	0%
Terpenuhinya Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%	50%
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	38%	38%

Tabel 2.3

Cost per Outcome Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Tepenuhinya Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	50%	50%				
2.	Tepenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	60%	60%				
3.	Tepenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	0%	0%				
4.	Tepenuhinya Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%	50%				
5.	Tepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	38%	38%				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1,873,153,552	991,726,439	52.94%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang / Bulan	13 Orang / Bulan	100%	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2 Laporan	25%	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	66,7%	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	50%	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	
Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	8 Unit	0 Unit	0%	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	7 Unit	5 Unit	71,4%	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	21 Unit/ Tahun	12 Unit/ Tahun	57,1%	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0%	

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Tepenuhinya Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	50%	36%	14%
2.	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	70,28%	-10,28%
3.	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0%	0%	0%
4.	Terpenuhinya Fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50%	46,31%	3,69%
5.	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	38%	33,72%	4,28%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA
 1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.
- ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA
 1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
 2. Kuantitas dan kwalitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang
- UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA
 1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada
 2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
 3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag
 4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain
.....

BAB III

PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan ketegori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah sebesar 50% dan Capaian Anggaran sebesar 36%, Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 60% dan Capaian Anggaran sebesar 70,28%, Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sebesar 0% dan Capaian Anggaran sebesar 0%, Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 50% dan Capaian Anggaran sebesar 46,31%, sedangkan Capaian Kinerja Sasaran Tepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 38% dan Capaian Anggaran sebesar 33,72%.

b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

Kedungjajang 01 Juli 2024

SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO,SP

NIP. 19700714 199403 1 004

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SUDARMI, SAP

NIP. 19750623 201001 2 001

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaporan kinerja tersebut terdapat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menjelaskan bahwa Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi /LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dang anti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,terwujudlah komitmen penerima manah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berkenaan,tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasubag Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

● **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Kedungjajang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja individu yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjajang Tahun 2024.

Hasil pengukuran capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian Kepala Sub Bag Keuangan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kasubag Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	47%	47%
Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	72.97%	72.97%

Tabel 2.3
Cost per Outcome Kasubag Keuangan Tahun 2024 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	47%	47%				
2.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	72.97%	72.97%				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1,873,153,552	991,726,439	52.94%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 4/3	6
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	0 dok	0%	Penyusunan RKA pada TW IV
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	0 dok	0%	Penyusunan perubahan RKA pada TW III
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	6 dok	50%	
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0 laporan	0%	
Terlaksananya Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	6 dok	50%	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok 2 dok	0 dok	0%	

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3 Laporan	60%	Realisasi LKJIP dan LKJ TW I
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	4 Laporan	50%	Realisasi evaluasi renja TW I,II dan IKM

● **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Pengukuran efisiensi di Kecamatan Kedungjajang dilakukan dengan membandingkan tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika penyerapan anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja. Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kedungjajang dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Realisasi		Efisiensi
			Kinerja	Anggaran	
1.	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	47%	20.75%	26.25%
2.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72.97%	55.95%	17.02%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 2. Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 3. Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
 4. Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.
- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Keterbatasan sarana dan prasarana secara kuantitas dan kualitas belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan Kecamatan Kedungjajang
 2. Kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur kecamatan masih kurang

- UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA
 1. Optimalisasi sarana dan prasaranayang sudah ada
 2. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai prioritas
 3. Peningkatan Pemahaman terhadap tupoksi pada masing-masing seksi dan subag
 4. Mengoptimalkan aparatur kecamatan yang sudah ada

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dalam pencapaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

1. Membangun komitmen aparatur pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing - masing;
2. Adanya evaluasi berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan kegiatan seksi;
3. Membudayakan tertib administrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain
.....

BAB III

PENUTUP

Kecamatan Kedungjajang yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Kedungjajang merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja sasaran Terasilinasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebesar 47% dan Capaian Anggaran sebesar 20.75%, sedangkan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah sebesar 72.97 dan Capaian Anggaran sebesar 55.95%
- b. Adapun Faktor penunjang keberhasilan tercapainya kedua sasaran yaitu: Komitmen Camat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dukungan Camat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Terdapat koordinasi yang baik antar aparatur pemerintahan kecamatan dengan aparatur pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Adanya komitmen dan koordinasi Kepala Seksi dengan jajarannya dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik.

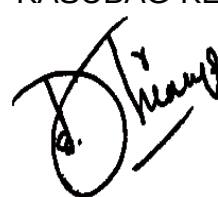
SEKRETARIS KECAMATAN



BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

Kedungjajang 01 Juli 2024

KASUBAG KEUANGAN



DHIAN PUSPITASARI, S.TP
NIP. 19741004 200604 2 022

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

Formulir E.01 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Periode Pelaksanaan Tahun 2024 Triwulan I																											
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD / Indikator Tujuan Perangkat Daerah																											
a. Indikator : Indeks Pelayanan Publik																											
b. Target Kinerja : 8-(95)																											
c. Realisasi Kinerja :																											
Kode Program/kegiatan Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan Kinerja	Target Periode Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Predikat Capaian Kinerja (Tabel 1E-1)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Kendala/permasalahan yang menghambat Capaian Indikator Program/kegiatan sub Kegiatan	Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah, Penanggungjawab			
								I		31-May-24		II		III		13 = 9+10+11+12									14 = 13/8 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 13	17 = 16/8 x 100%	18	19	20								
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang dilaksanakan x 100 % Jumlah Fasilitas dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang terkait	90.16 %	7,545,795,088	85.48 %	1,829,293,710	90.16 %	2,078,481,352	68.85 %	515,835,447	78.69	271,378,967	78.69 %	228,632,025	78.69 %	1,015,846,439	87.28%	48.87%	Tinggi	78.69 %	1,015,846,439	87.28%	13%		
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa		Rate-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen administrasi tepat waktu x 100 % Jumlah seluruh desa di Kecamatan x 3 dokumen	91.67 %	146,520,000	97.22 %	280,800,000	91.67 %	31,485,000	33.33 %	-	0 %	7,125,000	0 %	-	33.33 %	7,125,000	36.36%	22.63%	Sangat rendah	33.33 %	7,125,000	36.36%	5%		Kec. Kedungjajang
7.01.01	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran terpenuhi/Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang harus dipenuhi*100%	100 %	6,519,055,088	100 %	1,888,410,633	100 %	1,873,153,552	28 %	496,815,447	13.40 %	268,078,967	12.82 %	226,932,025	54.68 %	991,726,439	54.68%	52.94%	Sangat rendah	54.68 %	991,726,439	54.68%	19%		SEKRETARIAT
7.01.01.201	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terpenuhi/Jumlah fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang harus dipenuhi	100 %	65,270,000	100 %	6,200,000	100 %	10,299,600	29.41 %	1,237,500	0 %	600,000	17.65 %	300,000	47 %	2,137,500	47.06%	20.79%	Sangat rendah	47.06 %	2,137,500	47.06%	3%		Kasubag Keuangan
7.01.01.201.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	18,270,000	3 dok	2,500,000	2 dok	3,000,000	- dok	1,087,500	- dok	450,000	- dok	-	- dok	1,537,500	0%	51%	Sangat rendah	- %	1,537,500	0%	8%		
7.01.01.201.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dok	13,500,000	1 dok	1,500,000	1 dok	2,499,900	- dok	-	- dok	-	- dok	-	- dok	-	0%	0%	Sangat rendah	- %	-	0%	0%		
7.01.01.201.03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dok	9,000,000	-	-	1 dok	1,999,800	- dok	-	- dok	-	- dok	150,000.00	- dok	150,000	0%	8%	Sangat rendah	- %	150,000	0%	2%		
7.01.01.201.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	12,500,000	5 laporan	2,200,000	5 laporan	1,500,000	2 laporan	150,000	- laporan	-	1 laporan	-	3 laporan	150,000	60%	10%	Sangat rendah	3 %	150,000	20.00%	1%		
7.01.01.201.07	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	12,000,000	-	-	8 laporan	1,299,900	2 laporan	-	- laporan	150,000	2 laporan	150,000.00	4 laporan	300,000	50%	23%	Sangat rendah	4 %	300,000	16.67%	9%		
7.01.01.202	Terpenuhinya fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang harus dipenuhi	100 %	4,231,119,038	100 %	1,306,157,909	100 %	1,433,729,339	48.65 %	402,851,460	16.22 %	199,084,532	8.11 %	200,263,861	72.97 %	802,199,853	72.97%	55.99%	Sangat rendah	72.97 %	802,199,853	72.97%	19%		Kasubag Keuangan
7.01.01.202.01	Tersedianya Gaj dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN	13 org/3000	4,117,483,038	13 Orng/bn	1,278,645,909	13 Orng/bn	1,403,498,939	13 Orng/bn	394,976,460	13 Orng/bn	194,559,532	13 Orng/bn	197,673,861.00	13 Orng/bn	787,209,853	100%	56.09%	sangat tinggi	13 %	787,209,853	100%	19%		
7.01.01.202.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dok	89,136,000	12 dok	25,512,000	12 dok	26,400,000	3 dok	6,600,000	2 dok	4,225,000	1 dok	2,025,000.00	6 dok	12,850,000	50.00%	48.67%	Sangat rendah	6 %	12,850,000	16.67%	14%		
7.01.01.202.04	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	36 dok	12,500,000	-	-	12 dok	1,430,400	3 dok	150,000	2 dok	-	1 dok	565,000.00	6 dok	715,000	50.00%	49.99%	Sangat rendah	6 %	715,000	16.67%	6%		
7.01.01.202.05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	12,000,000	5 Laporan	2,000,000	1 laporan	2,400,000	0 dok	1,125,000	- dok	300,000	1 dok	-	1 laporan	1,425,000	100%	59.38%	Sangat rendah	1.00 %	1,425,000	33%	12%		
7.01.01.203	Terpenuhinya fasilitas administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang harus dipenuhi	100 %	32,500,000	100 %	2,000,000	100 %	2,799,900	22.22 %	-	11.11 %	-	16.67 %	999,750	50 %	999,750	50.00%	36%	Sangat rendah	50.00 %	999,750	50.00%	3%		Kasubag Umum
7.01.01.203.01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 dok	12,000,000	-	-	2 dok	600,000	- dok	-	- dok	-	1 dok	450,000.00	1 dok	450,000	50%	75%	Sangat rendah	1.00 %	450,000	17%	4%		
7.01.01.203.05	Terselenggaranya Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	8,500,000	-	-	4 laporan	699,900	1 laporan	-	- laporan	-	1 laporan	174,750.00	2 laporan	174,750	50%	25%	Sangat rendah	2 %	174,750	16.67%	2%		
7.01.01.203.06	Terselenggaranya Pemasalahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemasalahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemasalahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemasalahan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 laporan	12,000,000	12 Laporan	2,000,000	12 laporan	1,500,000	3 laporan	-	2 laporan	-	1 laporan	375,000.00	6 laporan	375,000	50%	25%	Sangat rendah	6 %	375,000	16.67%	3%		
7.01.01.206	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah terpenuhi/Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang harus dipenuhi	100 %	556,582,290	100 %	80,634,678	100 %	86,696,469	27.14 %	31,239,442	15.49 %	25,524,500	16.90 %	4,167,800	60 %	60,930,842	59.54%	70.28%	Sangat rendah	59.54 %	60,930,842	59.54%	11%		Kasubag Umum
7.01.01.206.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Perangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	27,992,113	2 paket	3,518,700	2 paket	4,980,792	2 paket	4,830,000	- paket	-	- paket	-	2 paket	4,830,000	100%	96.97%	sangat tinggi	2 %	4,830,000	33.33%	17%		
7.01.01.206.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 paket	255,338,437	3 paket	30,415,328	6 paket	35,499,077	2 paket	16,632,342	2 paket	15,524,500	- paket	-	4 paket	32,156,842	66.67%	90.59%	Sedang	4 %	32,156,842	22.22%	13%		
7.01.01.206.05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	42,164,940	3 paket	8,285,050	3 paket	8,080,600	2 paket	2,857,100	1 paket	450,000	1 paket	457,000.00	3 paket	3,764,100	100.00%	46.58%	sangat tinggi	3 %	3,764,100	33.33%	9%		
7.01.01.206.08	Terselenggaranya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36 laporan	18,246,800	12 laporan	2,700,000	12 laporan	4,240,000	3 laporan	-	2 laporan	900,000	1 laporan	-	6 laporan	900,000	50.00%	21%	Sangat rendah	6 %	900,000	16.67%	5%		
7.01.01.206.09	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	212,840,000	4 laporan	35,715,600	4 laporan	33,896,000	2 laporan	6,920,000	1 laporan	8,650,000	3 laporan	3,710,000.00	4 laporan	19,280,000	100%	57%	Sedang	4 %	19,280,000	11.11%	9%		
7.01.01.207	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi/Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan * 100	100 %	254,000,000	0 %	446,985,446	100 %	51,225,945	0 %	-	0 %	-	0 %	-	- %	-	0%	0%	Sangat rendah	- %	-	0%	0%		Kasubag Umum

7.01.01.207.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didisalkan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didisalkan	143 unit	254,000,000	-	-	8 unit	51,225,945	- unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	0%	0%	Sangat rendah	- %	-	0%	0%				
7.01.01.208	Terpenuhinya fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi/Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan x 100	100 %	712,301,760	100 %	222,992,723	100 %	234,088,000	25 %	50,777,045	16.67 %	35,021,435	8.33 %	17,973,414	50 %	103,771,894	50%	46.31%	Sangat rendah	50 %	103,771,894	50%	15%			Kasubag Umum
7.01.01.208.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisalkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisalkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisalkan	36 laporan	167,080,000	12 laporan	34,384,403	12 laporan	50,400,000	3 laporan	9,582,042	2 laporan	6,199,149	1 laporan	3,562,271.00	6 laporan	19,344,062	50%	38.38%	Sangat rendah	6 %	19,344,062	16.67%	12%			
7.01.01.208.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisalkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisalkan	36 laporan	545,721,760	12 laporan	188,608,320	12 laporan	173,688,000	3 laporan	41,194,403	2 laporan	28,822,286	1 laporan	14,411,143.00	6 laporan	84,427,832	50.00%	48.61%	Sangat rendah	6 %	84,427,832	16.67%	15%			
7.01.01.209	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan/Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan x 100	100 %	667,282,000	100 %	47,432,600	100 %	64,314,299	16.67 %	10,710,000	11.90 %	7,848,500	9.52 %	3,128,000	38 %	21,686,500	38.10%	33.72%	Sangat rendah	38.10 %	21,686,500	38.10%	3%			Kasubag Umum
7.01.01.209.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit/tahun	104,892,000	7 Unit/tahun	33,182,600	7 unit/tahun	33,514,600	2 unit/tahun	6,660,000	2 unit/tahun	5,148,500	1 unit/tahun	1,778,000.00	5 unit/tahun	13,586,500	71%	40.54%	Rendah	5.00 %	13,586,500	24%	13%			
7.01.01.209.06	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87 unit/tahun	57,850,000	21 unit	14,250,000	21 unit/tahun	14,250,000	6 unit/tahun	4,050,000	4 unit/tahun	2,700,000	2 unit/tahun	1,350,000.00	12 unit/tahun	8,100,000	57.14%	56.84%	Sangat rendah	12 %	8,100,000	13.79%	14%			
7.01.01.209.10	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	504,540,000	0 unit	-	1 unit	16,549,699	0 unit	-	- unit	-	- unit	-	- unit	-	0%	0%	Sangat rendah	- %	-	0%	0%			
7.01.02	Meningkatnya persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang dilaksanakan dibagi jumlah Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP yang direncanakan dikali 100	100 %	72,055,000	100 %	30,227,500	100 %	9,504,800	29.34 %	1,200,000	21.72 %	1,800,000	3.49 %	600,000	55 %	3,600,000	54.95%	37.88%	Sangat rendah	54.95 %	3,600,000	54.95%	9%			Kasi Pelayanan Umum
7.01.02.204	Meningkatnya Persentase fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	72,055,000	100 %	30,227,500	100 %	9,504,800	14.29 %	1,200,000	14.29 %	1,800,000	14.29 %	600,000	43 %	3,600,000	42.86%	37.88%	Sangat rendah	42.86 %	3,600,000	42.86%	9%			
7.01.02.204.03	Tersedianya Urusan Pemerintahan yang Terkai dengan Keuangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkai dengan Keuangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keuangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keuangan Lain yang Dilimpahkan	18 laporan	72,055,000	6 laporan	10,237,500	3 laporan	9,504,800	1 laporan	1,200,000	1 laporan	1,800,000	1 laporan	600,000.00	3 laporan	3,600,000	100.00%	37.88%	Sedang	3 %	3,600,000	16.67%	5%			
7.01.03	Meningkatnya rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah (persentase) fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi Jumlah (persentase) fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2	97 %	648,960,000	100 %	168,733,300	97 %	142,328,000	30.95 %	5,220,000	0 %	300,000	8.33 %	600,000	39 %	6,120,000	40.50%	4.30%	Sangat rendah	39.29 %	6,120,000	40.50%	1%			Kasi PMD
7.01.03.201	Meningkatnya persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100	94 %	605,560,000	100 %	153,638,300	94 %	120,028,000	61.90 %	5,220,000	0 %	300,000	0 %	-	62 %	5,920,000	65.86%	4.60%	Rendah	61.90 %	5,520,000	65.86%	1%			
7.01.03.201.01	Tersedianya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga masyarakat	14,700,000	6 lembaga masyarakat	7,805,000	6 lembaga masyarakat	2,850,000	0 lembaga masyarakat	-	0 lembaga masyarakat	-	6 lembaga masyarakat	-	100%	0%	sangat tinggi	6.00 %	-	100%	0%	-	0%			
7.01.03.201.02	Tersedianya Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 dok	25,000,000	-	-	2 dok	7,320,000	1 dok	5,220,000	1 dok	300,000	- dok	-	2 dok	5,520,000	100%	75.41%	sangat tinggi	2.00 %	5,520,000	33.33%	22%			
7.01.03.201.03	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27 laporan	565,860,000	7 laporan	145,833,300	7 laporan	109,858,000	0 laporan	-	0 laporan	-	- laporan	-	- laporan	-	0%	0%	Sangat rendah	- %	-	0%	0%			
7.01.03.206	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100	100 %	44,400,000	100 %	15,095,000	100 %	22,200,000	0 %	-	0 %	-	16.67 %	600,000	17 %	600,000	17%	3%	Sangat rendah	16.67 %	600,000	17%	1%			
7.01.03.206.01	Meningkatnya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	- keluarga	-	-	60 keluarga	12,000,000	- keluarga	-	- keluarga	-	- keluarga	-	20 keluarga	600,000.00	33%	5%	Sangat rendah	20.00 %	600,000	N/A	N/A	Kesalahan Sub kegiatan pada Rencana	Perbaikan P-rena		
7.01.03.206.03	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150 keluarga	12,650,000	15 keluarga	8,250,000	50 keluarga	2,850,000	- keluarga	-	- keluarga	-	0 keluarga	-	- keluarga	-	0%	0%	Sangat rendah	- %	-	0.00%	0%			
7.01.03.206.08	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeposi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeposi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeposi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeposi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	72 keluarga	12,150,000	95	6,845,000	24 keluarga	2,100,000	- keluarga	-	- keluarga	-	- keluarga	-	- keluarga	-	0%	0%	Sangat rendah	- %	-	0%	0%			
7.01.03.206.11	Tersedianya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	72 keluarga	19,600,000	0 keluarga	-	24 keluarga	5,250,000	- keluarga	-	- keluarga	-	- keluarga	-	- keluarga	-	0%	0%	Sangat rendah	- %	-	0%	0%			
7.01.04	Meningkatnya Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100	100 %	136,600,000	0%	-	100 %	14,910,000	50 %	10,800,000	0 %	-	0 %	-	50 %	10,800,000	50%	72.43%	Sangat rendah	50 %	10,800,000	50%	8%			Kasi Pemerintahan
7.01.04.201	Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	6 fasilitas	136,600,000	-	-	100 %	14,910,000	50 %	10,800,000	0 %	-	0 %	-	50 %	10,800,000	50%	72.43%	Sangat rendah	50 %	10,800,000	833.33%	8%			
7.01.04.201.03	Tersedianya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	113,215,000	-	-	1 laporan	10,800,000	1 laporan	10,800,000	- laporan	-	- laporan	-	1 laporan	10,800,000	100%	100%	sangat tinggi	1 %	10,800,000	33.33%	10%			

*) Disisi oleh Kepala BAPPEDA

		Lumajang, tanggal _____	Devisasi Lumajang, tanggal _____
		Kepala Perangkat Daerah.	Kepala Bappeda
		Kabupaten Lumajang	Kabupaten Lumajang
a.	Disi dengan indikator Tujuan Perangkat Daerah		
b.	Disi dengan target indikator tujuan perangkat Daerah Tahun berjalan		
c.	Disi dengan realisasi indikator tujuan Perangkat Daerah Tahun berjalan		
d.	Disi dengan penjelasan faktor-faktor pendukung keberhasilan tercapainya indikator Tujuan Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)		
e.	Disi dengan penjelasan faktor-faktor pendukung keberhasilan tercapainya indikator Sasaran Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)		
f.	Disi dengan penjelasan faktor-faktor penghambat keberhasilan tercapainya indikator Tujuan Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)		
g.	Disi dengan penjelasan faktor-faktor penghambat keberhasilan tercapainya indikator Sasaran Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)		
Kolom 1	-	-	-
Kolom 2	-	-	-
Kolom 3	-	-	-
Kolom 4	-	-	-
Kolom 5	-	-	-
Kolom 6	-	-	-
Kolom 7	-	-	-
Kolom 8	-	-	-
Kolom 9	-	-	-
Kolom 10	-	-	-
Kolom 11	-	-	-
Kolom 12	-	-	-
Kolom 13	-	-	-
Kolom 14	-	-	-
Kolom 15	-	-	-
Kolom 16	-	-	-
Kolom 17	-	-	-
Kolom 18	-	-	-
Kolom 19	-	-	-
Kolom 20	-	-	-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMSUL NURUL HUDA, SE**

Jabatan : **CAMAT KEDUNGJAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si**

Jabatan : **Pj. BUPATI LUMAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024**

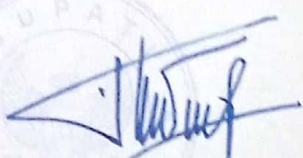
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	90.16 %
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata – rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	91.67%

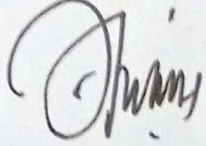
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	PPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.873.153.552	DAU
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 9.504.800	DAU
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 142.228.000	DAU
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 14.910.000	DAU
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 7.200.000	DAU
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 31.485.000	DAU
	JUMLAH	Rp. 2.078.481.352	DAU

Lumajang, 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG

CAMAT KEDUNGJAJANG


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si


SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG YULIANTO, SP**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAMSUL NURUL HUDA, SE**

Jabatan : **CAMAT KEDUNGAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA


SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

PIHAK PERTAMA


BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
Meningkatnya persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%
Meningkatnya rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	97%
Meningkatnya Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
Meningkatnya Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
Meningkatnya Persentase Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes,APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%
	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	75%
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.299.600	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.433.729.339	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.799.900	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 86.696.469	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 51.225.945	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 224.088.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 64.314.299	
8.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 9.504.800	
9.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 120.028.000	
10.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 22.200.000	
11.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 14.910.000	
12.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 7.200.000	
13.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 31.485.000	
JUMLAH		2.078.481.352	

Lumajang, 10 Januari 2024



CAMAT

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

SEKRETARIS



BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAHRIADI**
Jabatan : **KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAMSUL NURUL HUDA, SE**
Jabatan : **CAMAT KEDUNGJAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

PIHAK PERTAMA

SAHRIADI
NIP. 19670813 198703 1 008

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
2.	Terlaksananya Fasilitasi Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
3.	Meningkatnya Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes dan LPPDes tepat waktu	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	RP.	10.800.000	DAU
2.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	RP.	4.110.000	DAU
3.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	RP.	7.200.000	DAU
4.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	RP.	1.800.000	DAU
5.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	RP.	21.375.000	DAU
6.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	RP.	1.800.000	DAU
7.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	RP.	4.035.000	DAU
8.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	RP.	2.025.000	DAU
9.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	RP.	450.000	DAU
JUMLAH		RP.	53.595.000	DAU

Lumajang, 10 Januari 2024


SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

KASI PEMERINTAHAN


SAHRIADI
NIP. 19670813 198703 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASIFAH MARDIANA**
Jabatan : **TENAGA UPAH BULANAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAHRIADI**
Jabatan : **KASI PEMERINTAHAN KEC. KEDUNGJAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SAHRIADI

NIP. 19670813 198703 1 008

PIHAK PERTAMA

ASIFAH MARDIANA

NIP. -

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

NO.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
2.	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan
3.	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen
4.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen
5.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 dokumen
6.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen
7.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen
8.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen
9.	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen

Lumajang, 10 Januari 2024

KASI PEMRINTAHAN



SAHRIADI

NIP. 19670813 198703 1 008

PENGADMINISTRASI UMUM



ASIFAH MARDIANA

NIP. -



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HOLAP, S.Sos**
Jabatan : Kasi. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAMSUL NURUL HUDA, SE**
Jabatan : CAMAT KEDUNGJAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

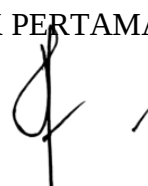
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

PIHAK PERTAMA

HOLAP, S.Sos
NIP. 19670101 199202 1 005

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	94 %
2.	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarkat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 2.850.000	DAU
2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 7.320.000	DAU
3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 109.858.000	DAU
4.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rp. 12.000.000	DAU
5.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rp. 2.850.000	DAU
6.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rp. 2.100.000	DAU
7.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rp. 5.250.000	DAU
JUMLAH		RP. 142.228.000	DAU

Lumajang, 10 Januari 2024


SAMSUL NURUL HUDA, SE
NIP. 19830608 201001 1 034

KASI PMD

HOLAP, S. Sos
NIP. 19670101 199202 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LUQMAN HADI PURNAMA, SH**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HOLAP, S.Sos**
Jabatan : **Kasi. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

HOLAP, S.Sos

NIP. 19670101 199202 1 005

PIHAK PERTAMA

LUQMAN HADI PURNAMA, SH

NIP. 19821021 201101 1 004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan
2	Terlaksananya Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen
3	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan
4	Meningkatnya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	60 keluarga
5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	50 Keluarga
6	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	24 Keluarga
7	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	24 Keluarga

Lumajang, 10 Januari 2024

KASI, PMD



HOLAP, S. Sos

NIP. 19670101 199202 1 005

PENGADMINISTRASI UMUM



LUQMAN HADI PURNAMA, SH

NIP. 19821021 201101 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOSIN SUSWIYANTO**
Jabatan : **KASI PELAYANAN UMUM KECAMATAN KEDUNGJAJANG**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAMSUL NURUL HUDA ,SE**
Jabatan : **CAMAT KEDUNGJAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SAMSUL NURUL HUDA,SE
NIP. 19830608 201001 1 034

PIHAK PERTAMA

TOSIN SUSWIYANTO
NIP. 19670704 199403 1 015

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100 %

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RP. 9.504.800	DAU
	JUMLAH	RP. 9.504.800	DAU

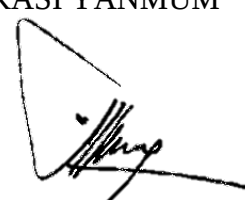
Lumajang, 10 Januari 2024

CAMAT



SAMSUL NURUL HUDA,SE
NIP. 19830608 201001 1 034

KASI YANMUM



TOSIN SUSWIYANTO
NIP. 19670704 199403 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AWANG EKO CAHYONO,S.IP**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM PELAYANAN UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TOSIN SUSWIYANTO**

Jabatan : **KASI PELAYANAN UMUM KEC. KEDUNGJAJANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

TOSIN SUSWIYANTO

NIP. 19670704 199403 1 015

PIHAK PERTAMA

AWANG EKO CAHYONO,S.IP

NIP.19790701 201101 1 005

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan

Lumajang, 10 Januari 2024

KASI YANMUM



TOSIN SUSWIYANTO
NIP. 19670704 199403 1 015

PENGADMINISTRASI UMUM PELAYANAN
UMUM



AWANG EKO CAHYONO,S.IP
NIP.19790701 201101 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDARMI, S.AP**
Jabatan : **KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAMBANG YULIANTO, SP**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

BAMBANG YULIANTO, SP

NIP. 19700714 199403 1 004

PIHAK PERTAMA

SUDARMI, SAP

NIP . 19750623 201001 2 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
Meningkatnya Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %
Meningkatnya Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	600.000	DAU
2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	699.900	DAU
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	1.500.000	DAU
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	51.225.945	DAU
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	4.980.792	DAU
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	35.499.077	DAU
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	8.080.600	DAU
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	4.240.000	DAU
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	33.896.000	DAU
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	50.400.000	DAU
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	173.688.000	DAU
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	33.514.600	DAU
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	14.250.000	DAU
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	16.549.699	DAU
JUMLAH		RP.	429.124.613	DAU

Lumajang, Januari 2024

SEKRETARIS



BAMBANG YULIANTO, SP
NIP. 19700714 199403 1 004

KASUBAG UMUM



SUDARMI, S.AP
NIP . 19750623 201001 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MA. BUDI RAHARJO**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SUDARMI, S.AP**
Jabatan : **KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SUDARMI, S.AP

NIP . 19750623 201001 2 001

PIHAK PERTAMA

MA. BUDI RAHARJO

NIP. 19690901 201001 1 005

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARJET
Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket
Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
Tersusunnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bln

Lumajang, 10 Januari 2024

KASUBAG UMUM



SUDARMI, S.AP

NIP . 19750623 201001 2 001

PENGELOLA KEPEGAWAIAN



MA. BUDI RAHARJO

NIP. 19690901 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IHWAN HARIYANTO
Jabatan : PENGURUS BARANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUDARMI, S.AP
Jabatan : KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

SUDARMI, S.AP

NIP . 19750623 201001 2 001

PIHAK PERTAMA

IHWAN HARIYANTO

NIP. 19810929 201001 1 009

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit

Lumajang, 10 Januari 2024

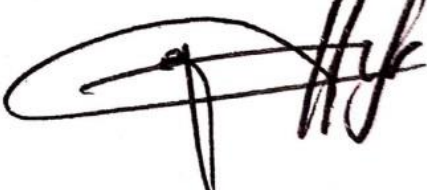
KASUBAG UMUM



SUDARMI, SAP

NIP . 19750623 201001 2 001

PENGADMINISTRASI UMUM



IHWAN HARIYANTO

NIP. 19810929 201001 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DHIAN PUSPITASARI**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAMBANG YULIANTO, SP**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

BAMBANG YULIANTO, SP

NIP. 19700714 199403 1 004

PIHAK PERTAMA

DHIAN PUSPITASARI

NIP. 19741004 200604 2 022

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGATAN	TARJET
1. Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2. Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	2. Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.000.000	DAU
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.499.900	DAU
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 1.999.800	DAU
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.500.000	DAU
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.299.900	DAU
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.403.498.939	DAU
7.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 26.400.000	DAU
8.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 1.430.400	DAU
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 2.400.000	DAU
JUMLAH		RP. 1.444.028.939	DAU

SEKRETARIS



BAMBANG YULIANTO, SP

NIP. 19700714 199403 1 004

Lumajang, 10 Januari 2024

KASUBAG KEUANGAN



DHAN PUSPITASARI

NIP. 19741004 200604 2 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DHIAN PUSPITASARI**

Jabatan : **BENDAHARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DHIAN PUSPITASARI**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

DHIAN PUSPITASARI

NIP. 19741004 200604 2 022

PIHAK PERTAMA

DHIAN PUSPITASARI

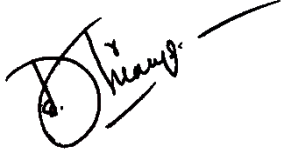
NIP. 19741004 200604 2 022

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARJET
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan

Lumajang, 10 Januari 2024

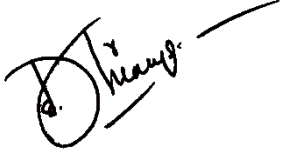
KASUBAG KEUANGAN



DHIAN PUSPITASARI

NIP. 19741004 200604 2 022

BENDAHARA



DHIAN PUSPITASARI

NIP. 19741004 200604 2 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDAH KURNIA**
Jabatan : **PENGADMINISTRASI KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DHIAN PUSPITASARI**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

DHIAN PUSPITASARI

NIP. 19741004 200604 2 022

PIHAK PERTAMA

INDAH KURNIA

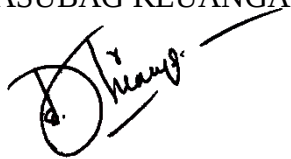
NIP. -

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARJET
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen

Lumajang, 10 Januari 2024

KASUBAG KEUANGAN



DHIAN PUSPITASARI

NIP. 19741004 200604 2 022

PENGADMINISTRASI KEUANGAN



INDAH KURNIA

NIP. -



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI WULANDARI**
Jabatan : **PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DHIAN PUSPITASARI**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang 10 Januari 2024

PIHAK KEDUA

DHIAN PUSPITASARI

NIP. 19741004 200604 2 022

PIHAK PERTAMA

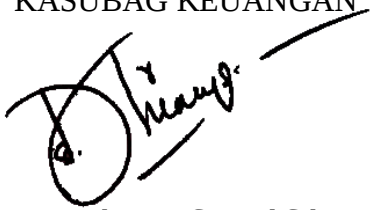
DWI WULANDARI

NIP. -

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG
TAHUN 2024

SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan

Lumajang, 10 Januari 2024

KASUBAG KEUANGAN

DHIAN PUSPITASARI
NIP. 19741004 200604 2 022

PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

DWI WULANDARI
NIP. -